

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Teori Entitas**

Teori Entitas (*entity theory*) adalah konsep yang mendasari mengenai pengelolaan “*stewardship*” dan pertanggungjawaban “*accountability*” suatu organisasi atau bisnis yang mengedepankan keberlangsungan usaha dan informasi keuangan usaha bagi pemilik ekuitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan legal dan menjaga suatu hubungan baik dengan pemegang ekuitas tersebut dengan harapan mudah memperoleh dana di masa depan. Konsep entitas berlaku untuk firma, perusahaan perseorangan, korporasi (baik berupa perseroan maupun nonperseroan), serta perusahaan kecil dan besar. (Suwardjono, 2005) .

Teori entitas ini memandang koperasi sebagai unit yang terpisah dari pemilik modal sehingga memiliki kewajiban untuk membuat pelaporan keuangan unit usaha (koperasi) kepada pemilik. Secara tidak langsung kesatuan usaha menjadi kesatuan pelapor (*reporting entity*) yang bertanggungjawab kepada pemilik modal yaitu anggota koperasi dan masyarakat.

##### **2. Pengertian Koperasi**

Sejarah koperasi lahir pada pemula abad ke – 19 sebagai suatu reaksi terhadap sistem perekonomian kapitalisme di Negara – negara Eropa. Sistem ekonomi ini bersendi pada kebebasan individu untuk mencari keuntungan

sebanyak mungkin. Akibatnya kelompok – kelompok tertentu yaitu kaum kapitalis menguasai kehidupan masyarakat luas. Mereka hidup berlebihan, sedangkan masyarakat yang tidak memiliki modal makin tertindas. Pada saat itulah tumbuh aliran kebersamaan yang menentang aliran individualisme ini dengan asas kebersamaan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Bentuk kerja sama ini melahirkan suatu perkumpulan yang dinamakan koperasi.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip – prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan (Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 04/Per/M.KUKM/VII/2012 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi). Pengertian lainnya tentang Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang atau perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi (Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian., n.d.).

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri – ciri yang melekat pada pengertian koperasi adalah sebagai berikut :

- a. Adanya kelompok orang yang mempunyai kepentingan ekonomis yang sama.

- b. Memiliki dan membangun satu usaha bersama.
- c. Memiliki motivasi kuat untuk dapat berdikari sebagai kegiatan utama dan pada kelompok.

Kepentingan bersama yang merupakan cermin dari kepentingan individu/anggota adalah tujuan utama bersama mereka.

### **3. Karakteristik Koperasi**

Koperasi didirikan dan melakukan kegiatannya berdasarkan nilai – nilai : kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab, sosial dan peduli terhadap orang lain (Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 04/Per/M.KUKM/VII/2012 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi). .

Koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Untuk itu koperasi mempunyai fungsi dan peran untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan usaha anggota dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan usahanya. Karakteristik koperasi yaitu :

- a. Koperasi dibentuk oleh anggota atas dasar kepentingan ekonomi yang sama.
- b. Koperasi didirikan dan dikembangkan berlandaskan nilai – nilai kemandirian, kesetiakawanan, keadilan, kebersamaan dan demokrasi, tanggung jawab sosial serta kepedulian terhadap orang lain.
- c. Koperasi didirikan, diatur, dikelola, diawasi serta dimanfaatkan oleh anggotanya.

- d. Tugas pokok koperasi adalah melayani kebutuhan ekonomi anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggotanya.

#### **4. Perbedaan Koperasi dan Non Koperasi**

Ditinjau dari proses kegiatan dalam usaha mencapai cita – citanya sebagai badan usaha, dapat dengan jelas terlihat perbedaan antara koperasi dan non koperasi tersebut (Rudianto, 2010). Dalam hubungan ini beberapa dimensi dapat digunakan sebagai variabel menjelaskan perbedaan yang dimaksud, yaitu antara lain :

- a. Dimensi Kekuasaan Tertinggi Dalam Menentukan Kebijakan Usaha.

Perbedaannya dalam koperasi kebijaksanaan ada ditangan para anggota melalui kelengkapan koperasi yang disebut “ Rapat Anggota Tahunan“. Sedangkan dalam badan usaha non koperasi kekuasaan terdapat pada para pemegang saham.

- b. Dimensi Ketatalaksanaan Usaha.

Koperasi pada perinsipnya adalah *open management* (keterbukaan manajemen). Sedangkan pada non koperasi dimensi ketatalaksanaan usaha ini adalah bersifat tertutup. Perbedaannya yaitu bila koperasi usahannya ditujukan kepada dua sektor yaitu sektor intern (anggota) dan sektor ekstern (bukan anggota/umum). Sedangkan bagi non koperasi aspek tersebut hanya ditujukan untuk umum dan masyarakat disekitar yang ingin menggunakan jasa usaha tersebut.

c. Dimensi Dasar Keyakinan Usaha.

Pada badan usaha koperasi lebih mengutamakan pada kekuatan sendiri. Sedangkan pada badan usaha non koperasi berdasarkan keyakinan usahanya pada kekuatan modal dan pasar.

d. Dimensi Kemanfaatan Usaha, Dimensi Modal Kerja, Dimensi

Pembagian Sisa Hasil Usaha. Bagi badan usaha koperasi usahanya bermanfaat bagi anggotanya dan juga masyarakat. Sedangkan pada badan non koperasi kemanfaatan usaha tersebut tertuju kepada pemilik – pemilik modal dan masyarakat. Bila didasarkan pada modal usahanya dari masyarakat yang melebihi saham – sahamnya.

e. Dimensi Sikap Terhadap Pasar.

Dalam pembagian sisa hasil usaha (SHU) atau surplus atau keuntungan maka dalam koperasi didasarkan pada banyaknya jasa anggota sedangkan pada usaha non koperasi maka pembagian sisa hasil usaha (SHU) atau surplus atau keuntungan maka berdasarkan pada modal yang disetorkan. Demikian pula bila ditinjau dari dimensi sikap keduanya terhadap pasar, pada koperasi dijalin koordinasi antara koperasi sedangkan pada usaha non koperasi sikapnya terhadap pasar adalah persaingan murni.

f. Dimensi Tujuan Usaha.

Ditinjau dari dimensi tujuan usaha yaitu tujuan didirikannya koperasi adalah untuk memberikan pelayanan sedangkan pada non

koperasi tujuan usahanya adalah mencari keuntungan sebesar – besarnya.

## **5. Pengertian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan bagian dari laporan pertanggung jawaban pengurus selama satu periode akuntansi, yang dapat dipakai sebagai bahan untuk menilai hasil kerja pengelolaan koperasi (Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 04/Per/M.KUKM/VII/2012 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi). Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu (Harahap, 2013)”.

Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (DE SAK EP & Indonesia, 2020).

## **6. Tujuan dan Karakteristik Laporan Keuangan Koperasi**

Menurut (Kasmir, 2013), tujuan dari pembuatan laporan keuangan yaitu:

- a. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.

- b. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban serta modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
- c. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu
- d. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
- e. Informasi keuangan lainnya.

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, 2009). Dalam (Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 04/Per/M.KUKM/VII/2012 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi) sesuai dengan (Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik, 2012), karakteristik yang bersifat spesifik dari laporan keuangan koperasi diantaranya adalah :

- a. Laporan keuangan merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban pengurus selama satu periode akuntansi, yang dapat dipakai sebagai bahan untuk menilai hasil kerja pengelolaan koperasi.
- b. Laporan keuangan koperasi merupakan bagian dari sistem pelaporan koperasi yang ditujukan untuk pihak internal maupun eksternal koperasi.

c. Laporan keuangan koperasi harus berdayaguna bagi para anggotanya, sehingga pihak anggota dapat menilai manfaat ekonomi yang diberikan koperasi dan berguna juga untuk mengetahui :

- 1) Prestasi unit kegiatan koperasi yang secara khusus bertugas memberi pelayanan kepada para anggotanya selama satu periode akuntansi tertentu:
- 2) Prestasi unit kegiatan koperasi yang secara khusus ditujukan untuk tujuan bisnis dengan non anggota selama satu periode akuntansi tertentu:
- 3) Informasi penting lainnya yang mempengaruhi keadaan keuangan koperasi jangka pendek dan jangka panjang.

Pada badan usaha koperasi, pemiliknya adalah anggota koperasi. Berarti laporan keuangan yang di susun terutama untuk kepentingan anggota. Oleh karena kegiatan koperasi cenderung ditujukan kepada kepentingan anggota maka dalam laporan keuangan sedapat mungkin harus memisahkan antara aktivitas yang dilakukan oleh anggota dan non anggota.

Sesuai isi dari (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, 2009) Komponen laporan keuangan dilengkapi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), meliputi:

- a. Neraca.
- b. Perhitungan Hasil Usaha / Laporan Laba Rugi.
- c. Laporan perubahan ekuitas.

- d. Laporan Arus Kas.
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan

## **7. Standar Akuntansi Keuangan Untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK - ETAP)**

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tanggal 19 Mei 2009. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) terdiri dari 30 BAB, yang mana pada tiap – tiap bab membahas standar akuntansi (ketentuan) yang berbeda – beda. Standar Akuntansi Keuangan Untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) suatu peraturan yang di buat oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang tidak semua perusahaan mentaatinya, Standar Akuntansi Keuangan Untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksud untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang memiliki dua kriteria yang menentukan apakah suatu entitas tergolong dari entitas tanpa akuntabilitas publik.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) akan dinyatakan efektif berlaku untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik, yaitu entitas yang memiliki 2 kriteria, yaitu : tidak memiliki akuntabilitas publik secara signifikan dan tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Kriteria Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) tersebut, bisa dibedakan dengan entitas yang memiliki akuntabilitas publik, yaitu jika :

- a. Entitas telah mengajukan pertanyaan pendaftaran atau entitas dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal.
- b. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pedagang efek, dana pensiun dan bank investasi.

Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang berwenang membuat regulasi yang menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Penerbitan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) oleh Dirjen Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) ini adalah sebagai alternatif Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang boleh diterapkan oleh entitas di Indonesia, sebagai bentuk Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang lebih sederhana dibandingkan dengan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) umum yang lebih rumit. Yang diberlakukan mulai dari 1 Januari 2011, setiap entitas diberikan pilihan apakah menggunakan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Umum atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Apabila entitas tersebut memenuhi kriteria entitas publik, maka tentu tidak ada pilihan lain kecuali menerapkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Umum. Namun jika tidak termasuk entitas yang

memiliki akuntan publik, maka entitas dapat memilih menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Menurut kebijakan yang diterbitkan oleh Dirjen Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Pada 1 Januari 2011, suatu entitas tanpa akuntabilitas publik, dapat memilih untuk menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) atau Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Umum.

#### **8. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)**

Secara umum Standar Akuntansi Keuangan merupakan pedoman pokok penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi perusahaan dan unit ekonomi lain yang sangat penting agar laporan keuangan lebih berguna, dapat dimengerti, dibandingkan dan tidak menyesatkan. Terdapat empat alasan penting dalam Standar Akuntansi Keuangan, yaitu :

- a. Memberi pedoman dan peraturan bagi akuntan publik agar dapat melaksanakan tugas dengan independen, hati-hati dan dapat mengabdikan keahliannya dan kejujuran meliputi penyusunan laporan keuangan
- b. Dapat menyajikan informasi tentang posisi keuangan, kegiatan dan prestasi perusahaan. Informasi yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang diharapkan mempunyai sifat jelas, konsisten, terpercaya dan dapat diperbandingkan

- c. Dapat menarik perhatian para ahli dan praktisi di bidang teori dan Standar Akuntansi. Semakin banyak Standar Akuntansi yang dikeluarkan semakin banyak kontroversi dan semakin banyak usaha untuk berdebat, berpolemik dan melakukan penelitian.
- d. Memberikan database kepada pemerintah tentang berbagai informasi yang dianggap penting dalam perhitungan pajak, peraturan tentang perusahaan, perencanaan, pengaturan ekonomi, peningkatan efisiensi ekonomi dan tujuan makro lainnya.

## **9. Ruang Lingkup SAK ETAP**

SAK ETAP diterbitkan tahun 2009 berlaku efektif 1 Januari 2011 dan dapat diterapkan lebih awal yaitu 1 Januari 2010. Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang :

- a. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan
- b. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika :

- 1) Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau

2) Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pension, reksa dana dan bank investasi. Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK ETAP.

## **10. Manfaat SAK ETAP**

Berikut ini adalah beberapa manfaat SAK ETAP menurut (Martani, 2011):

- a. Diharapkan dengan adanya SAK ETAP, perusahaan kecil, menengah mampu untuk menyusun laporan keuangan sendiri, dapat diaudit dan mendapat opini, sehingga dapat menggunakan laporan keuangannya untuk mendapat dana (misalnya dari bank) untuk mengembangkan usaha
- b. Lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK sehingga lebih mudah dalam implementasinya
- c. Tetap memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan.

## **11. Laporan Keuangan Lengkap Menurut SAK ETAP**

Berikut komponen-komponennya :

### **a. Neraca**

SAK ETAP Bab 4 mengatur informasi yang disajikan dalam neraca dan bagaimana penyajiannya. Neraca menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas suatu entitas pada suatu tanggal tertentu— akhir periode pelaporan (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas

Publik, 2009). Berikut adalah ketentuan dalam SAK ETAP mengenai neraca yang disajikan dalam bentuk tabel:

**Tabel 2.1**  
**Ruang Lingkup Neraca Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) tahun 2009.**

No	Kriteria	Ketentuan SAK ETAP
1	Ruang Lingkup	4.1 Bab ini mengatur informasi yang disajikan dalam neraca dan bagaimana penyajiannya. Neraca menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitassuatu entitas pada suatu tanggal tertentu – akhir periode pelaporan.
2	Informasi yang disajikan dalamneraca	4.2 Neraca minimal mencakup pos-pos berikut: 1) kas dan setara kas; 2) piutang usaha dan piutang lainnya; 3) persediaan; 4) properti investasi; 5) aset tetap; 6) aset tidak berwujud; 7) utang usaha dan utang lainnya; 8) aset dan kewajiban pajak; 9) kewajiban diestimasi; 10) ekuitas.
		4.3 Entitas menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya dalam neraca jika penyajian seperti itu relevan dalam rangka pemahaman terhadap posisi keuangan entitas.
		4.4 SAK ETAP tidak menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang disajikan.
3.	Klasifikasi aset dan kewajiban	4.5 Entitas harus menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang, sebagai suatu klasifikasi yang terpisah dalam neraca sesuai paragraf 4.6-4.9, kecuali jika penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang andal dan lebih relevan. Jika pengecualian tersebut diterapkan, maka semua aset dan kewajiban harus disajikan berdasarkan likuiditasnya.
4.	Aset lancar	4.6 Entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika: 1) diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan, dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas; 2) dimiliki untuk diperdagangkan;

		<p>3) diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan; atau</p> <p>4) berupa kas atau setara kas, kecuali jika dibatasi penggunaannya dari pertukaran atau digunakan untuk menyelesaikan kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.</p>
		4.7 Entitas mengklasifikasikan semua aset lainnya sebagai tidak lancar. Jika siklus operasi normal entitas tidak dapat diidentifikasi dengan jelas, maka siklus operasi diasumsikan 12 bulan.
5.	Kewajiban jangka pendek	<p>4.8 Entitas mengklasifikasikan kewajiban sebagai kewajiban jangka pendek jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi entitas;</li> <li>2) dimiliki untuk diperdagangkan;</li> <li>3) kewajiban akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan; atau</li> <li>4) entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian kewajiban setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.</li> </ol>
		4.9 Entitas mengklasifikasikan semua kewajiban lainnya sebagai kewajiban jangka panjang.
6.	Urutan dan format pos dalam neraca	<p>4.10 SAK ETAP tidak menentukan format atau urutan terhadap pos-pos yang akan disajikan. Paragraf 4.2 hanya menyediakan daftar pos-pos yang berbeda baik sifat atau fungsinya untuk menjamin penyajian yang terpisah dalam neraca. Sebagai tambahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pos yang terpisah akan dibentuk jika ukuran, sifat, atau fungsi dari pos atau agregasi terhadap pos-pos yang serupa membuat penyajian terpisah menjadi relevan untuk memahami posisi keuangan entitas; dan</li> <li>b. uraian yang digunakan dan urutan pos-pos atau agregasi terhadap pos-pos yang sejenis mungkin diubah sesuai dengan sifat entitas dan transaksinya, untuk menyediakan informasi yang relevan dalam rangka memahami posisi keuangan entitas.</li> </ol>
		<p>4.11 Pertimbangan atas pos-pos tambahan yang disajikan secara terpisah berdasarkan pada penilaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sifat dan likuiditas aset;</li> <li>b. fungsi aset dalam entitas; dan</li> <li>c. jumlah, sifat dan waktu kewajiban.</li> </ol>
6.	Informasi disajikan di neraca atau catatan atas laporan keuangan	<p>4.12 Entitas mengungkapkan di neraca atau catatan atas laporan keuangan, subklasifikasi berikut atas pos yang disajikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kelompok aset tetap;</li> <li>b. jumlah piutang usaha, piutang dari pihak-pihak yang</li> </ol>

		<p>memiliki hubungan istimewa, pelunasan dipercepat dan jumlah lainnya;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c. persediaan yang menunjukkan secara terpisah jumlah dari:</li> <li>d. persediaan yang dimiliki untuk dijual dalam kegiatan usaha normal;</li> <li>e. persediaan dalam proses produksi untuk penjualan tersebut;</li> <li>f. bahan baku dan barang habis pakai yang digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa;</li> <li>g. kewajiban imbalan kerja dan kewajiban diestimasi lainnya;</li> <li>h. kelompok ekuitas, seperti modal disetor, tambahan modal disetor, agio saham, saldo laba, dan</li> <li>i. pendapatan dan beban yang diakui langsung ke ekuitas.</li> </ul>
		<p>4.13 Entitas yang berbentuk Perseroan Terbatas mengungkapkan antara lain hal-hal berikut di neraca atau catatan atas laporan keuangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. untuk setiap kelompok modal saham:</li> <li>b. jumlah saham modal dasar;</li> <li>c. jumlah saham yang diterbitkan dan disetor penuh;</li> <li>d. nilai nominal saham;</li> <li>e. ikhtisar perubahan jumlah saham beredar;</li> <li>f. hak, keistimewaan dan pembatasan yang melekat pada setiap jenis saham, termasuk pembatasan atas dividen dan pembayaran kembali atas modal;</li> <li>g. Penjelasan mengenai cadangan dalam ekuitas.</li> </ul>
		<p>4.14 Entitas selain berbentuk Perseroan Terbatas, seperti persekutuan, mengungkapkan informasi yang setara seperti disyaratkan dalam paragraf 4.13(a), yang menunjukkan perubahan selama periode untuk setiap kategori ekuitas, serta hak, keistimewaan dan pembatasan untuk setiap kategori ekuitas.</p>

*Sumber: SAK ETAP 2009 (ETAP 19-ETAP 22)*

Berikut ini disajikan pula format penyajian laporan keuangan neraca koperasi berdasarkan SAK ETAP:

**Tabel 2.2**  
**Format Penyajian Laporan Keuangan Neraca Koperasi Menurut**  
**Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK**  
**ETAP) tahun 2009**

KOPERASI NUSA BANGSA					
NERACA					
Tanggal 31 Desember 20X2 dan 20X1					
		20X2		20X1	
Aset				Kewajiban dan ekuitas	
Aset lancar				Kewajiban jangka pendek	
Kas		XXX	XXX	Simpanan anggota	
Bank		XXX	XXX	Simpanan sukarela	XXX XXX
Surat berharga		XXX	XXX	Simpanan berjangka	XXX XXX
Piutang usaha		XXX	XXX	SHU bagian anggota	XXX XXX
Piutang pinjaman anggota		XXX	XXX	Utang usaha	XXX XXX
Piutang pinjaman non-anggota		XXX	XXX	Utang bank/lembaga keuangan lainnya	XXX XXX
Penyisihan piutang tak tertagih		(XXX)	(XXX)	Utang jangka pendek lain	XXX XXX
Persediaan		XXX	XXX	Beban yang masih harus dibayar	XXX XXX
Beban dibayar di muka		XXX	XXX	Pendapatan diterima di muka	XXX XXX
Pendapatan akan diterima		XXX	XXX	Jumlah kewajiban jangka pendek	XXX XXX
Aset lancar lainnya		XXX	XXX		
Jumlah aset lancar		XXX	XXX		
Aset tidak lancar				Kewajiban jangka panjang	
Investasi jangka panjang		XXX	XXX	Utang bank/lembaga keuangan lainnya	XXX XXX
Properti investasi		XXX	XXX	Kewajiban imbalan pasca kerja	XXX XXX
Akumulasi penyusutan properti investasi		(XXX)	(XXX)	Kewajiban jangka panjang lainnya	
Aset tetap				Kewajiban kepada pihak lain	XXX XXX
Tanah		XXX	XXX	Jumlah kewajiban jangka panjang	XXX XXX
Bangunan		XXX	XXX		
Mesin dan kendaraan		XXX	XXX	Ekuitas	
Inventaris dan peralatan kantor		XXX	XXX	Simpanan pokok	XXX XXX
Akumulasi penyusutan aset tetap		(XXX)	(XXX)	Simpanan wajib	XXX XXX
Aset tak berwujud		XXX	XXX	Hibah	XXX XXX
Akumulasi amortisasi aset tak berwujud		(XXX)	(XXX)	Cadangan	XXX XXX
Aset tidak lancar lainnya		XXX	XXX	SHU tahun berjalan	XXX XXX
Jumlah aset tidak lancar		XXX	XXX	Jumlah ekuitas	XXX XXX
Jumlah aset		XXX	XXX	Jumlah kewajiban dan ekuitas	XXX XXX

*Sumber : Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 2009*

### a. Laporan Laba Rugi

SAK ETAP Bab 5 mensyaratkan entitas untuk menyajikan laporan laba rugi untuk suatu periode yang merupakan kinerja keuangannya selama periode tersebut (Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), 2009). Bab ini juga mengatur informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi dan bagaimana penyajiannya. Laporan laba rugi menyajikan penghasilan dan beban entitas untuk suatu periode. Berikut adalah ketentuan dalam SAK ETAP mengenai laporan laba rugi yang disajikan dalam bentuk tabel:

**Tabel 2.3**  
**Ruang Lingkup Laporan Laba Rugi menurut Standar Akuntansi**  
**Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) tahun 2009.**

No.	Kriteria	Ketentuan SAK ETAP
1.	Ruang lingkup	5.1 Bab ini mensyaratkan entitas untuk menyajikan laporan laba rugi untuk suatu periode yang merupakan kinerja keuangannya selama periode tersebut. Bab ini juga mengatur informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi dan bagaimana penyajiannya. Laporan laba rugi menyajikan penghasilan dan beban entitas untuk suatu periode.
		5.2 Laporan laba rugi memasukkan semua pos penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode kecuali SAK ETAP mensyaratkan lain. SAK ETAP mengatur perlakuan berbeda terhadap dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai bagian dari laba atau rugi dalam periode terjadinya perubahan (lihat Bab 9 Kebijakan Akuntansi, Estimasi, dan Kesalahan
2.	Informasi yang disajikan di laporan laba rugi	5.3 Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos sebagai berikut: 1) pendapatan; 2) beban keuangan; 3) bagian laba atau rugi dari investasi yang menggunakan metode ekuitas; 4) beban pajak; 5) laba atau rugi neto.

		5.4 Entitas harus menyajikan pos, judul dan sub jumlah lainnya pada laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas.
		5.5 Entitas tidak boleh menyajikan atau mengungkapkan pos pendapatan dan beban sebagai “pos luar biasa”, baik dalam laporan laba rugi maupun dalam catatan ataslaporan keuangan.
	Analisis beban	<p>5.6 Entitas menyajikan suatu analisis beban dalam suatu klasifikasi berdasarkan sifat atau fungsi beban dalam entitas, mana yang memberikan informasi yang lebih andal dan relevan.</p> <p><i>Analisis Menggunakan Sifat Beban</i> Berdasarkan metode ini, beban dikumpulkan dalam laporan laba rugi berdasarkan sifatnya (contoh, penyusutan, pembelian bahan baku, biaya transportasi, imbalan kerja dan biaya iklan), dan tidak dialokasikan kembali antara berbagai fungsi dalam entitas.</p> <p><i>Analisis Menggunakan Fungsi Beban</i> Berdasarkan metode ini, beban dikumpulkan sesuai fungsinya sebagai bagian dari biaya penjualan atau, sebagai contoh, biaya aktivitas distribusi atau aktivitas administrasi. Sekurang- kurangnya, entitas harus mengungkapkan biaya penjualannya sesuai metode ini terpisah dari beban lainnya.</p>
		5.7 Entitas dianjurkan untuk menyajikan analisis diatas pada laporan laba rugi.
		5.8 Entitas yang mengklasifikasikan beban berdasarkan fungsi mengungkapkan informasi tambahan berdasarkan sifat beban, termasuk penyusutan dan beban amortisasi dan beban imbalan kerja.

Sumber: SAK ETAP 2009 (ETAP 23-ETAP 25)

Berikut ini disajikan pula format penyajian laporan keuangan laba rugi koperasi berdasarkan SAK ETAP:

**Tabel 2.4**  
**Format Penyajian Laporan Keuangan Laba Rugi Koperasi**  
**Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas**  
**Publik (SAK ETAP) tahun 2009**

KOPERASI NUSA BANGSA		
PERHITUNGAN HASIL USAHA		
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 20X2 dan 20X1		
	20X2	20X1
Pelayanan anggota		
Pelayanan bruto	XXX	XXX
Beban pokok pelayanan	(XXX)	(XXX)
Pelayanan neto	XXX	XXX
Pendapatan dari non-anggota		
Penjualan pada non-anggota	XXX	XXX
Beban pokok penjualan	(XXX)	(XXX)
Laba non-anggota	XXX	XXX
SHU kotor	XXX	XXX
Beban operasional		
Beban usaha	XXX	XXX
Beban perkoperasian	XXX	XXX
Beban operasional lain	XXX	XXX
Total beban operasional	(XXX)	(XXX)
SHU operasional	XXX	XXX
Pendapatan dan beban lain		
Pendapatan lain	XXX	XXX
Beban lain	(XXX)	(XXX)
SHU sebelum bunga dan pajak	XXX	XXX
Beban bunga	(XXX)	(XXX)
SHU sebelum pajak	XXX	XXX
Beban pajak penghasilan	(XXX)	(XXX)
SHU setelah pajak	XXX	XXX

*Sumber : Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 2009*

## **b. Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba**

Laporan laba rugi dan saldo laba menyajikan laba atau rugi entitas dan perubahan saldo laba untuk suatu periode pelaporan. Paragraf 3.13 yaitu “Jika entitas hanya mengalami perubahan ekuitas yang muncul dari laba atau rugi, pembayaran dividen, koreksi kesalahan periode lalu, dan perubahan kebijakan akuntansi selama periode laporan keuangan disajikan maka entitas dapat menyajikan laporan laba rugi dan saldo laba sebagai pengganti laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas” (ETAP 17). Hal ini berarti SAK ETAP mengizinkan entitas untuk menyajikan laporan laba rugi dan saldo laba menggantikan laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas jika perubahan pada ekuitas hanya berasal dari laba atau rugi, pembayaran dividen, koreksi kesalahan periode lalu, dan perubahan kebijakan akuntansi (Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), 2009).

## **c. Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi entitas untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan (tergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh entitas) jumlah investasi oleh, dan dividen dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama periode tersebut (Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), 2009). Berikut adalah ketentuan dalam SAK ETAP mengenai laporan perubahan ekuitas yang disajikan dalam bentuk tabel:

**Tabel 2.5**  
**Ruang Lingkup Laporan Perubahan Ekuitas menurut Standar**  
**Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)**  
**tahun 2009.**

No.	Kriteria	Ketentuan SAK ETAP
1	Ruang lingkup	6.1 Bab ini mengatur persyaratan untuk penyajian perubahan dalam ekuitas entitas selama suatu periode, baik dalam laporan perubahan ekuitas dan laporan laba rugi dan saldo laba (jika memenuhi kondisi tertentu).
	Tujuan	6.2 Laporan perubahan ekuitas menyajikan laba atau rugi entitas untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan (tergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh entitas) jumlah investasi oleh, dan dividen dan distribusi lain ke, pemilik ekuitas selama periode tersebut.
2	Informasi yang disajikan di Laporan Perubahan Ekuitas	6.3 Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) laba atau rugi untuk periode;</li> <li>2) pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas;</li> <li>3) untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui sesuai Bab 9 Kebijakan Akuntansi, Estimasi, dan Kesalahan;</li> <li>4) untuk setiap komponen ekuitas, suatu rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal dan akhir periode, diungkapkan secara terpisah perubahan yang berasal dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) laba atau rugi;</li> <li>b) pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas;</li> <li>c) jumlah, dividen dan distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, yang menunjukkan secara terpisah modal saham, transaksi saham treasury, dan dividen serta distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, dan perubahan</li> <li>d) kepemilikan dalam entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian.</li> </ol> </li> </ol>

*Sumber: SAK ETAP 2009 (ETAP 26-ETAP 27)*

Berikut ini disajikan pula format penyajian laporan perubahan ekuitas koperasi berdasarkan SAK ETAP:

**Tabel 2.6**  
**Format Penyajian Laporan Perubahan Ekuitas Koperasi Menurut**  
**Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK**  
**ETAP) tahun 2009**

KOPERASI NUSA BANGSA						
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS						
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 20X2 dan 20X1						
	Simpanan	Simpanan			SHU	
	Pokok	Wajib	Hibah	Cadangan	Tidak	Jumlah
Saldo awal	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Penambahan	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Pengurangan	(XXX)	(XXX)	(XXX)	(XXX)	(XXX)	(XXX)
Saldo akhir	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

*Sumber : Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 2009*

#### **d. Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba**

Laporan laba rugi dan saldo laba menyajikan laba atau rugi entitas dan perubahan saldo laba untuk suatu periode pelaporan. Paragraf 3.13 mengizinkan entitas untuk menyajikan laporan laba rugi dan saldo laba menggantikan laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas jika perubahan pada ekuitas hanya berasal dari laba atau rugi, pembayaran dividen, koreksi kesalahan periode lalu, dan perubahan kebijakan akuntansi (Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), 2009). Berikut adalah ketentuan

dalam SAK ETAP mengenai laporan laba rugi dan saldo laba yang disajikan dalam bentuk tabel:

**Tabel 2.7**  
**Ruang Lingkup Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) tahun 2009.**

No.	Kriteria	Ketentuan SAK ETAP
1	Tujuan	6.4 Laporan laba rugi dan saldo laba menyajikan laba atau rugi entitas dan perubahan saldo laba untuk suatu periode pelaporan. Paragraf 3.13 mengizinkan entitas untuk menyajikan laporan laba rugi dan saldo laba menggantikan laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas jika perubahan pada ekuitas hanya berasal dari laba atau rugi, pembayaran dividen, koreksi kesalahan periode lalu, dan perubahan kebijakan akuntansi
2	Informasi yang disajikan di Laporan Laba Rugi dan Saldo Laba	6.5 Entitas menyajikan di laporan laba rugi dan saldo laba pos-pos berikut sebagai tambahan atas informasi yang disyaratkan dalam Bab 5 <i>Laporan Laba Rugi</i> : 1) saldo laba pada awal periode pelaporan; 2) dividen yang diumumkan dan dibayarkan atau terutang selama periode; 3) penyajian kembali saldo laba setelah koreksi kesalahan periode lalu; 4) penyajian kembali saldo laba setelah perubahan kebijakan akuntansi; dan 5) saldo laba pada akhir periode pelaporan.

*Sumber: SAK ETAP 2009 (ETAP 27)*

#### **e. Laporan Arus Kas**

SAK ETAP Bab 7 mengatur informasi yang disajikan dalam laporan arus kas dan bagaimana penyajiannya. Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa

Akuntabilitas Publik, 2009). Berikut adalah ketentuan dalam SAK ETAP mengenai laporan arus kas yang disajikan dalam bentuk tabel:

**Tabel 2.8**  
**Ruang Lingkup Laporan Arus Kas menurut Standar Akuntansi**  
**Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) tahun 2009.**

No.	Kriteria	Ketentuan SAK ETAP
1	Ruang Lingkup	7.1 Bab ini mengatur informasi yang disajikan dalam laporan arus kas dan bagaimana penyajiannya. Laporan arus kas menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas, yang menunjukkan secara terpisah perubahan yang terjadi selama satu periode dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan
2.	Setara kas	7.2 Setara kas adalah investasi jangka pendek dan sangat likuid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Oleh karena itu, investasi umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang sejak tanggal perolehan. Cerukan bank pada umumnya termasuk aktivitas pendanaan sejenis dengan pinjaman. Namun, jika cerukan bank dapat ditarik sewaktu-waktu dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan kas entitas, maka cerukan tersebut termasuk komponenkas dan setara kas.
3.	Informasi yang disajikan dalam laporan Arus kas	7.3 Entitas menyajikan laporan arus kas yang melaporkan arus kas untuk suatu periode dan mengklasifikasikan menurut aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.
3.1	Aktivitas operasi	7.4 Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan entitas. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa dan kondisi lain yang mempengaruhi penetapan laba atau rugi. Contoh arus kas dari aktivitas operasi adalah: 1) penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa; 2) penerimaan kas dari royalti, fees, komisi dan pendapatan lain; 3) pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa; 4) pembayaran kas kepada dan atas nama karyawan; 5) pembayaran kas atau restitusi pajak penghasilan kecuali jika dapat diidentifikasi secara khusus

		<p>sebagai bagian dari aktivitas pendanaan dan investasi;</p> <p>6) penerimaan dan pembayaran kas dari investasi, pinjaman, dan kontrak lainnya yang dimiliki untuk tujuan perdagangan, yang sejenis dengan persediaan yang dimaksudkan untuk dijual kembali.</p> <p>Beberapa transaksi, seperti penjualan peralatan pabrik, dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian yang dimasukkan dalam perhitungan laba atau rugi. Tetapi, arus kas yang menyangkut transaksi tersebut merupakan arus kas dari aktivitas investasi.</p>
2.2	Aktivitas investasi	<p>7.5 Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pembayaran kas untuk memperoleh aset tetap (termasuk aset tetap yang dibangun sendiri), aset tidak berwujud dan aset jangka panjang lainnya;</li> <li>2) penerimaan kas dari penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lainnya;</li> <li>3) pembayaran kas untuk perolehan efek ekuitas atau efek utang entitas lain dan bunga dalam joint venture (selain pembayaran untuk efek yang diklasifikasikan sebagai kas atau setara kas atau dimiliki untuk diperdagangkan);</li> <li>4) penerimaan kas dari penjualan efek ekuitas atau efek utang dari entitas lain dan bunga dari joint venture (selain penerimaan dari efek yang diklasifikasikan sebagai setara kas atau dimiliki untuk diperdagangkan);</li> <li>5) uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain;</li> <li>6) penerimaan kas dari pembayaran kembali uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain;</li> </ol>
3.3	Aktivitas pendanaan	<p>7.6 Contoh arus kas yang berasal dari aktivitas pendanaan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penerimaan kas dari penerbitan saham atau efek ekuitas lain;</li> <li>b. pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau menebus saham entitas;</li> <li>c. penerimaan kas dari penerbitan pinjaman, wesel, dan pinjaman jangka pendek atau jangka panjang lainnya;</li> <li>d. pelunasan pinjaman;</li> </ol>

		<p>e. pembayaran kas oleh lessee untuk mengurangi saldo kewajiban yang berkaitan dengan sewa</p> <p>f. pembiayaan.</p>
4.	Pelaporan arus kas dari aktivitas operasi	7.7 Entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode tidak langsung. Dalam metode ini laba atau rugi neto disesuaikan dengan mengoreksi dampak dari transaksi non kas, penangguhan atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi di masa lalu dan masa depan, dan unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan.
		7.8 Dalam metode tidak langsung, arus kas neto dari aktivitas operasi ditentukan dengan menyesuaikan laba atau rugi dari dampak dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) perubahan persediaan dan piutang usaha serta utang usaha selama periode berjalan;</li> <li>2) pos non kas seperti penyusutan, penyisihan, dan keuntungan dan kerugian valuta asing yang belum direalisasi; dan</li> <li>3) semua pos lain yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan.</li> </ol>
5.	Pelaporan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan	7.9 Entitas melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas investasi dan pendanaan. Jumlah agregat arus kas yang berasal dari akuisisi dan pelepasan entitas anak atau unit usaha lain disajikan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi.
6.	Bunga dan dividen	7.10 Entitas mengungkapkan secara terpisah arus kas dari bunga dan dividen yang diterima dan dibayarkan. Entitas mengklasifikasikan arus kas secara konsisten antar periode sebagai aktivitas operasi, investasi, atau pendanaan
		7.11 Entitas mengklasifikasikan bunga yang dibayarkan dan bunga dan dividen yang diterima sebagai arus kas operasi karena termasuk laba atau rugi. Sebagai alternatif, bunga yang dibayarkan dan bunga dan dividen yang diterima dapat diklasifikasikan sebagai arus kas pendanaan dan arus kas investasi, karena merupakan biaya perolehan sumber daya keuangan atau hasil investasi.
		7.12 Dividen yang dibayarkan dapat diklasifikasikan sebagai arus kas pendanaan karena merupakan biaya perolehan sumber daya keuangan. Sebagai alternatif, dividen yang dibayarkan

		dapat diklasifikasikan sebagai komponen arus kas dari aktivitas operasi karena dividen dibayarkan dari arus kas operasi.
7	Pajak penghasilan	7.13 Entitas mengungkapkan secara terpisah arus kas yang berkaitan dengan pajak penghasilan dan mengklasifikasikannya sebagai arus kas aktivitas operasi, kecuali jika secara spesifik dapat diidentifikasi dengan aktivitas pendanaan dan investasi. Jika arus kas pajak dialokasikan pada lebih dari satu jenis aktivitas, maka jumlah keseluruhan pajak yang dibayar harus diungkapkan.
8.	Transaksi nonkas	7.14 Entitas mengeluarkan dari laporan arus kas, transaksi investasi dan pendanaan yang tidak memerlukan penggunaan kas atau setara kas. Entitas mengungkapkan transaksi tersebut dalam laporan keuangan sehingga memberikan semua informasi yang relevan mengenai aktivitas investasi dan pendanaan tersebut.
		7.15 Banyak aktivitas investasi dan pendanaan yang tidak mempunyai dampak langsung terhadap arus kas saat ini meskipun mempengaruhi struktur aset dan modal entitas. Tidak dimasukkannya transaksi non kas dalam laporan arus kas adalah konsisten dengan tujuan laporan arus kas sebab transaksi tersebut tidak mempengaruhi arus kas dalam periode berjalan. Contoh transaksi non kas adalah: a. perolehan aset secara kredit atau melalui sewapembiayaan. b. akuisisi suatu entitas melalui emisi saham. c. konversi utang menjadi modal.
9.	Komponen kas dan setara kas	7.16 Entitas mengungkapkan komponen kas dan setara kas dan menyajikan rekonsiliasi jumlah yang dilaporkan dalam laporan arus kas dengan pos yang sama yang disajikan dalam neraca.
10.	Pengungkapan lain	7.17 Entitas mengungkapkan, bersama dengan pendapat manajemen, jumlah kas dan setara kas yang signifikan yang dimiliki entitas, namun tidak dapat digunakan oleh entitas. Hal ini karena adanya pembatasan lalu lintas devisa atau pembatasan hukum

Sumber: SAK ETAP 2009 (ETAP 28-ETAP 33)

Berikut ini disajikan pula format penyajian laporan arus kas koperasi berdasarkan SAK ETAP:

**Tabel 2.9**  
**Format Penyajian Laporan Arus Kas Koperasi Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) tahun 2009**

KOPERASI NUSA BANGSA		
LAPORAN ARUS KAS		
Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember	20X2	20X1
<b>Arus kas dari aktivitas operasi</b>		
Penerimaan dari pelayanan anggota	XXX	XXX
Penerimaan dari penjualan non-anggota	XXX	XXX
Pembayaran terkait pembelian barangjasa untuk pelayanan anggota	(XXX)	(XXX)
Pembayaran terkait pembelian barangjasa untuk dijual ke non-anggota	(XXX)	(XXX)
Pembayaran biaya operasional dan administrasi	(XXX)	(XXX)
Pembayaran biaya bunga	(XXX)	(XXX)
Pembayaran pajak	(XXX)	(XXX)
Pembayaran pos luar biasa	(XXX)	(XXX)
Jumlah arus kas dari aktivitas operasi	XXX	XXX
<b>Arus kas dari aktivitas investasi</b>		
Penjualan surat berharga	XXX	XXX
Penjualan investasi jangka panjang	XXX	XXX
Penjualan properti investasi	XXX	XXX
Penjualan aset tetap	XXX	XXX
Pembelian surat berharga	(XXX)	(XXX)
Pembelian investasi jangka panjang	(XXX)	(XXX)
Pembelian properti investasi	(XXX)	(XXX)
Pembelian aset tetap	(XXX)	(XXX)
Jumlah arus kas dari aktivitas investasi	XXX	XXX
<b>Arus kas dari aktivitas pendanaan</b>		
Penerimaan simpanan pokok	XXX	XXX
Penerimaan simpanan wajib	XXX	XXX
Penerimaan hibah/idenasi tunai	XXX	XXX
Penerimaan pinjaman bank	XXX	XXX
Penerimaan pinjaman lembaga keuangan lain	XXX	XXX
Penerbitan surat utang	XXX	XXX
Pengembalian simpanan pokok	(XXX)	(XXX)
Pengembalian simpanan wajib	(XXX)	(XXX)
Pembayaran pinjaman bank	(XXX)	(XXX)
Pembayaran pinjaman lembaga keuangan lain	(XXX)	(XXX)
Pembayaran surat utang	(XXX)	(XXX)
Jumlah arus kas dari aktivitas pendanaan	XXX	XXX
Jumlah kenaikan (penurunan) kas	XXX	XXX
Saldo kas awal periode	XXX	XXX
Saldo kas akhir periode	XXX	XXX

*Sumber : Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik 2009*

**f. Catatan atas Laporan Keuangan**

SAK ETAP mengatur prinsip yang mendasari informasi yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan dan bagaimana penyajiannya. Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, 2009). Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Berikut adalah ketentuan dalam SAK ETAP mengenai catatan atas laporan keuangan yang disajikan dalam bentuk tabel:

**Tabel 2.10**  
**Ruang Lingkup Catatan atas Laporan Keuangan menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) tahun 2009.**

No.	Kriteria	Ketentuan SAK ETAP
1	Ruang lingkup	8.1 Bab ini mengatur prinsip yang mendasari informasi yang disajikan dalam catatan atas laporan keuangan dan bagaimana penyajiannya. Catatan atas laporan keuangan berisi informasi sebagai tambahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan memberikan penjelasan naratif atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan.
2.	Struktur	8.2 Catatan atas laporan keuangan harus: menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi tertentu yang digunakan sesuai dengan paragraf 8.5 dan 8.6; mengungkapkan informasi yang disyaratkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan; dan memberikan informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan, tetapi

		relevan untuk memahami laporan keuangan.
		8.3 Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis sepanjang hal tersebut praktis. Setiap pos dalam laporan keuangan merujuk-silang ke informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan.
		8.4 Secara normal urutan penyajian catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut: suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAK ETAP (lihat paragraf 3.3); ringkasan kebijakan akuntansi signifikan yang diterapkan (lihat paragraf 8.5); informasi yang mendukung pos-pos laporan keuangan, sesuai dengan urutan penyajian setiap komponen laporan keuangan dan urutan penyajian pos-pos tersebut. pengungkapan lain.
3.	Pengungkapan kebijakan akuntansi	8.5 Dalam ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan harus diungkapkan: a. dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan; b. kebijakan akuntansi lain yang digunakan yang relevan untuk memahami laporan keuangan
4.	Informasi tentang pertimbangan	8.6 Entitas harus mengungkapkan pertimbangan secara terpisah dari hal-hal yang melibatkan estimasi (lihat paragraf 8.7) dalam ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan atau catatan atas laporan keuangan lainnya yang digunakan manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi dan mempunyai pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

5.	Informasi tentang sumber utama ketidakpastian estimasi	8.7 Entitas harus mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan tentang informasi mengenai asumsi pokok tentang masa depan dan sumber-sumber pokok lain untuk mengestimasi ketidakpastian pada akhir periode pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang menyebabkan adanya suatu penyesuaian yang material terhadap jumlah tercatat aset dan kewajiban dalam laporan keuangan tahun berikutnya. Terkait aset dan kewajiban tersebut, catatan atas laporan keuangan harus memasukkan rincian tentang: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. sifat; dan</li> <li>b. jumlah tercatat pada akhir periode pelaporan.</li> </ul>
----	--	---

*Sumber: SAK ETAP 2009 (ETAP 34-ETAP 35)*

## **12. Penyajian Laporan Keuangan**

### **a) Penyajian Wajar**

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas. Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, kewajiban, penghasilan dan beban yang dijelaskan dalam Bab 2 *Konsep dan Prinsip Pervasif* (Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), 2009). Penerapan SAK ETAP, dengan pengungkapan tambahan jika diperlukan, menghasilkan laporan keuangan yang wajar atas posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas. Pengungkapan tambahan diperlukan ketika kepatuhan atas persyaratan tertentu dalam SAK ETAP tidak memadai bagi pemakai untuk memahami pengaruh dari

transaksi tertentu, peristiwa dan kondisi lain atas posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas.

**b) Kepatuhan terhadap SAK ETAP**

Entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh (*explicit and unreserved statement*) atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK ETAP kecuali jika mematuhi semua persyaratan dalam SAK ETAP (Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), 2009).

**c) Kelangsungan Usaha**

Saat menyusun laporan keuangan, manajemen entitas yang menggunakan SAK ETAP membuat penilaian atas kemampuan entitas melanjutkan kelangsungan usaha (Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), 2009). Entitas mempunyai kelangsungan usaha kecuali jika manajemen bermaksud melikuidasi entitas tersebut atau menghentikan operasi, atau tidak mempunyai alternatif realistis kecuali melakukan hal-hal tersebut. Dalam membuat penilaian kelangsungan usaha, jika manajemen menyadari terdapat ketidakpastian yang material terkait dengan peristiwa atau kondisi yang mengakibatkan keraguan signifikan terhadap kemampuan entitas untuk melanjutkan usaha, maka entitas harus mengungkapkan ketidakpastian tersebut. Ketika entitas tidak menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha,

maka fakta tersebut harus diungkapkan, bersama dengan dasar penyusunan laporan keuangan dan alasan mengapa entitas tidak dianggap mempunyai kelangsungan usaha.

**d) Frekuensi Pelaporan**

Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan (termasuk informasi komparatif) minimum satu tahun sekali (Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), 2009). Ketika akhir periode pelaporan entitas berubah dan laporan keuangan tahunan telah disajikan untuk periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, maka entitas mengungkapkan:

- (1) Fakta tersebut;
- (2) Alasan penggunaan untuk periode lebih panjang atau lebih pendek;  
dan
- (3) Fakta bahwa jumlah komparatif untuk laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan laba rugi dan saldo laba, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang terkait adalah tidak dapat seluruhnya diperbandingkan.

**e) Penyajian yang Konsisten**

Menurut (Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), 2009), penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten kecuali:

- (1) Terjadi perubahan yang signifikan atas sifat operasi entitas atau perubahan penyajian atau pengklasifikasian bertujuan menghasilkan

penyajian lebih baik sesuai kriteria pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi dalam Bab 9 *Kebijakan Akuntansi, Estimasi, dan Kesalahan*; atau

- (2) SAK ETAP mensyaratkan suatu perubahan penyajian.
  - (a) Jika penyajian atau pengklasifikasian pos-pos dalam laporan keuangan diubah, maka entitas harus mereklasifikasi jumlah komparatif kecuali jika reklasifikasi tidak praktis. Entitas harus mengungkapkan hal-hal berikut jika jumlah komparatif direklasifikasi:
    - (b) Sifat reklasifikasi;
    - (c) Jumlah setiap pos atau kelompok dari pos yang direklasifikasi; dan
    - (d) Alasan reklasifikasi.
  - (e) Jika reklasifikasi jumlah komparatif tidak praktis, maka entitas harus mengungkapkan:
    - (f) Alasan reklasifikasi jumlah komparatif tidak dilakukan; dan
    - (g) Sifat penyesuaian yang telah dibuat jika jumlah komparatif direklasifikasi.

**f) Informasi Komparatif**

Informasi harus diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya kecuali dinyatakan lain oleh SAK ETAP (termasuk informasi dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan). Entitas memasukkan informasi komparatif untuk informasi naratif dan deskriptif

jika relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan (Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), 2009).

**g) Materialitas dan Agregasi**

Pos-pos yang material disajikan terpisah dalam laporan keuangan sedangkan yang tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis (Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), 2009).

**h) Laporan Keuangan Lengkap**

Menurut (Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), 2009) , laporan keuangan entitas meliputi:

- (1) Neraca;
- (2) Laporan laba rugi;
- (3) Laporan perubahan ekuitas yang juga menunjukkan:
- (4) Seluruh perubahan dalam ekuitas, atau perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik;
- (5) Laporan arus kas; dan
- (6) Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Jika entitas hanya mengalami perubahan ekuitas yang muncul dari laba atau rugi, pembayaran dividen, koreksi kesalahan periode lalu, dan perubahan kebijakan akuntansi selama periode laporan keuangan disajikan maka entitas dapat menyajikan laporan laba rugi dan saldo laba sebagai pengganti laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Karena paragraf 3.9 mensyaratkan jumlah komparatif terhadap periode sebelumnya untuk semua jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan (apakah pada laporan keuangan atau pada catatan atas laporan keuangan), suatu laporan keuangan lengkap berarti bahwa suatu entitas harus menyajikan minimum dua periode dari setiap laporan keuangan yang disyaratkan dan catatan atas laporan keuangan yang terkait. Dalam suatu laporan keuangan lengkap, suatu entitas menyajikan setiap laporan keuangan dengan keunggulan yang sama.

**i) Identifikasi Laporan Keuangan**

Entitas harus mengidentifikasi secara jelas setiap komponen laporan keuangan termasuk catatan atas laporan keuangan. Jika laporan keuangan merupakan komponen dari laporan lain, maka laporan keuangan harus dibedakan dari informasi lain dalam laporan tersebut. Di samping itu, informasi berikut ini disajikan dan diulangi, bilamana perlu, pada setiap halaman laporan keuangan:

- (1) Nama entitas pelapor dan perubahan dalam nama tersebut  
sejak laporan periode terakhir;
- (2) Tanggal atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, mana

yang lebih tepat bagi setiap komponen laporan keuangan;

- (3) Mata uang pelaporan,
- (4) Pembulatan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan.

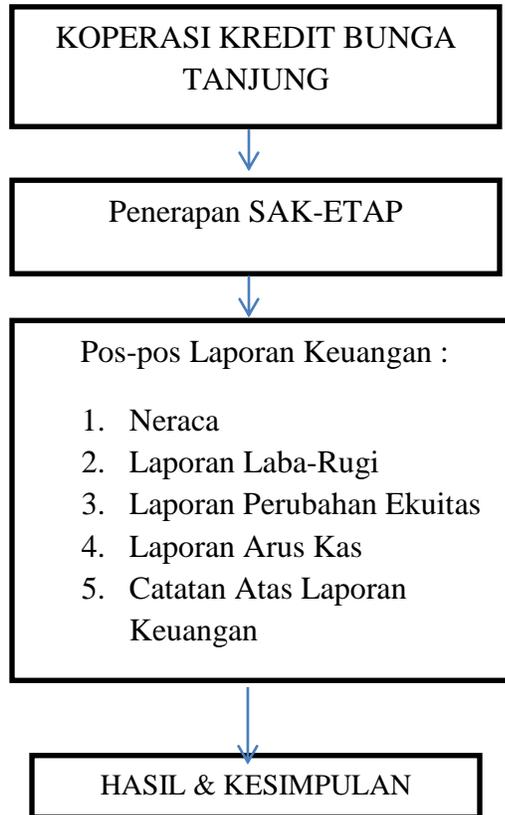
Entitas harus mengungkapkan hal berikut ini dalam catatan atas laporan keuangan:

- a. Domisili dan bentuk hukum entitas serta alamat kantornya yang terdaftar;
- b. Penjelasan sifat operasi dan aktivitas utamanya.

## **B. Kerangka Teori**

Berdasarkan teori-teori di atas, maka penulis membuat kerangka teori sebagai berikut:

**Gambar 2.11**  
**Kerangka Teori**



*Sumber : Diolah Oleh Penulis 2022*

### **C. Hipotesis**

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) merupakan standar pelaporan akuntansi yang dianjurkan kepada entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal. Koperasi merupakan bagian dari entitas tanpa akuntabilitas publik sehingga SAK ETAP harus diterapkan dalam penyusunan laporan keuangannya (Permenkop dan UKM No. 04/Per/M.KUKM/VII/2012). SAK ETAP lebih mudah dalam implementasinya namun tetap memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan.

Laporan keuangan koperasi yang disusun berdasarkan SAK-ETAP, akan membuat informasi yang disajikan menjadi lebih mudah dipahami, mempunyai relevansi, keandalan, dan mempunyai daya banding yang tinggi (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil Dan Menengah, 2016). Implementasi SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan koperasi sangat ditentukan oleh pemahaman akuntansi dan keuangan dari para pengurus koperasi. Dengan diterapkannya SAK ETAP akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan koperasi (Adiputra, I Made Sujana, Sinarwati, Ni Kadek dan Purnamawati, 2017). Dari uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

$H_{a_0}$  : Implementasi penyajian laporan keuangan Koperasi Kredit Bunga Tanjung belum sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

Ha<sub>1</sub> :Implementasi penyajian laporan keuangan Koperasi Kredit Bunga Tanjung sudah sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)